

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan professional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu model keberhasilan dan mencapai tujuan pembangunan daerah karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan. Peran pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin tinggi kualitas otonominya, namun sebaliknya jika semakin sedikit pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin rendah kualitas otonominya. Sumber pendapatan

asli daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP). Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kota/kabupaten.

Jenis pajak yang memiliki potensi untuk meningkat adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah provinsi dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan

Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan secara berturut-turut dihitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Penggunaan kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat dan menambah keuntungan bagi pemerintahan daerah dalam penerimaan pajak. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan yaitu dengan membandingkan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain dari pajak kendaraan bermotor, ada juga jenis pajak yang mempunyai penerimaan setiap tahunnya meningkat yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan, Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas).

Sebagai acuan untuk mengetahui perbandingan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan realisasi

pendapatan asli daerah (PAD) dari provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode waktu 2013-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Rp)	Persentase (%)
2013	528.832.134.000	97.337.481.839	18
2014	763.337.478.000	111.340.862.561	14
2015	882.315.240.378	118.936.789.553	13
2016	995.186.120.952	137.340.250.340	13
2017	1.047.491.567.026	161.605.019.038	15
2018	1.095.269.978.577	193.679.052.544	17
2019	1.258.958.953.288	231.471.136.410	18
2020	1.166.570.596.936	226.133.273.202	19
2021	1.238.032.648.888	235.693.390.636	19
2022	1.363.737.981.851	284.872.766.122	20
Rata-rata Kontribusi			17

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 1.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Rp)	Persentase (%)
2013	528.832.134.000	164.481.895.350	31
2014	763.337.478.000	175.214.861.575	23
2015	882.315.240.378	164.493.263.802	19
2016	995.186.120.952	194.208.145.060	20
2017	1.047.491.567.026	201.903.285.350	19
2018	1.095.269.978.577	216.765.904.805	20
2019	1.258.958.953.288	227.669.031.440	18
2020	1.166.570.596.936	167.990.177.037	14
2021	1.238.032.648.888	176.218.560.037	14
2022	1.363.737.981.851	168.796.403.412	12
Rata-rata Kontribusi			19

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel 1.1, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Pada tahun 2013 hingga tahun 2019 pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2013 pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 97.337.481.839 dan pada tahun 2019 pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 231.471.136.410. Pada pendapatan asli daerah meningkat dari tahun 2013 sampai ke tahun 2019, yaitu

pendapatan asli daerah di tahun 2013 adalah Rp. 528.832.134.000 dan pada tahun 2019 adalah Rp. 1.258.958.953.288. Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, pendapatan pajak kendaraan bermotor yaitu Rp. 226.133.273.202 dan pendapatan asli daerah yaitu Rp. 1.166.570.596.936. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah.

Pada tabel 1.2, realisasi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor meningkat dari Rp. 164.481.895.350 ke Rp. 175.214.861.575. pada tahun 2015 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan yaitu Rp. 164.493.263.802. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor meningkat yang pada tahun 2016 adalah Rp. 194.208.145.060 dan pada tahun 2019 adalah Rp. 227.669.031.440. pada tahun 2020 hingga tahun 2021 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor meningkat. Pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Artinya bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh dalam pendapatan asli daerah, dilihat pada tahun 2013 hingga tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah meningkat, tahun 2020 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan begitu juga dengan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2022

mengalami peningkatan pada pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan bermotor dari tahun 2020 sampai 2022 meningkat. Berbeda pada penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dilihat tahun 2013 hingga tahun 2014 meningkat, tahun 2015 mengalami penurunan, pada tahun 2016 hingga tahun 2019 meningkat, pada tahun 2020 hingga 2021 meningkat, kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Semakin meningkatnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah di Nusa Tenggara Timur.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Mustika Sari dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PKB dan BBNKB memberikan kontribusi besar bagi PAD, dari hasil analisis kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan keturunan dari tahun 2009-2012. Peneliti terdahulu oleh Putu Nadya Kardevi Rakatitha dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali” dengan hasil penelitian dari tahun 2013 hingga 2016 PKB dan BBNKB memberikan pengaruh positif terhadap PAD di Provinsi Bali yang meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul penelitian **“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Persoalan Penelitian

- a. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- b. Seberapa besar kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada 2 yaitu:

- a) Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.

- b) Manfaat Praktis

- 1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yakni sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari.

- 2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.